

Disajikan dalam Administrative Science Discussion Forum
(ASDF) oleh IKA FIA Universitas Brawijaya
Jakarta, 19 Mei 2017

KEBIJAKAN KEWILAYAHAN DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN (Perspektif Administrasi Publik)

Oleh:
Bambang Supriyono



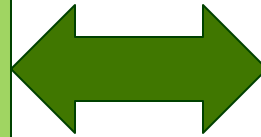
Substansi bahasan

- Fenomena kemiskinan di negara berkembang dan di Indonesia
- Pengentasan kemiskinan dalam dimensi Administrasi Publik
- Pentingnya inovasi dalam rangka pengentasan kemiskinan
- Penutup

FENOMENA KEMISKINAN DI INDONESIA

Fenomena Kemiskinan

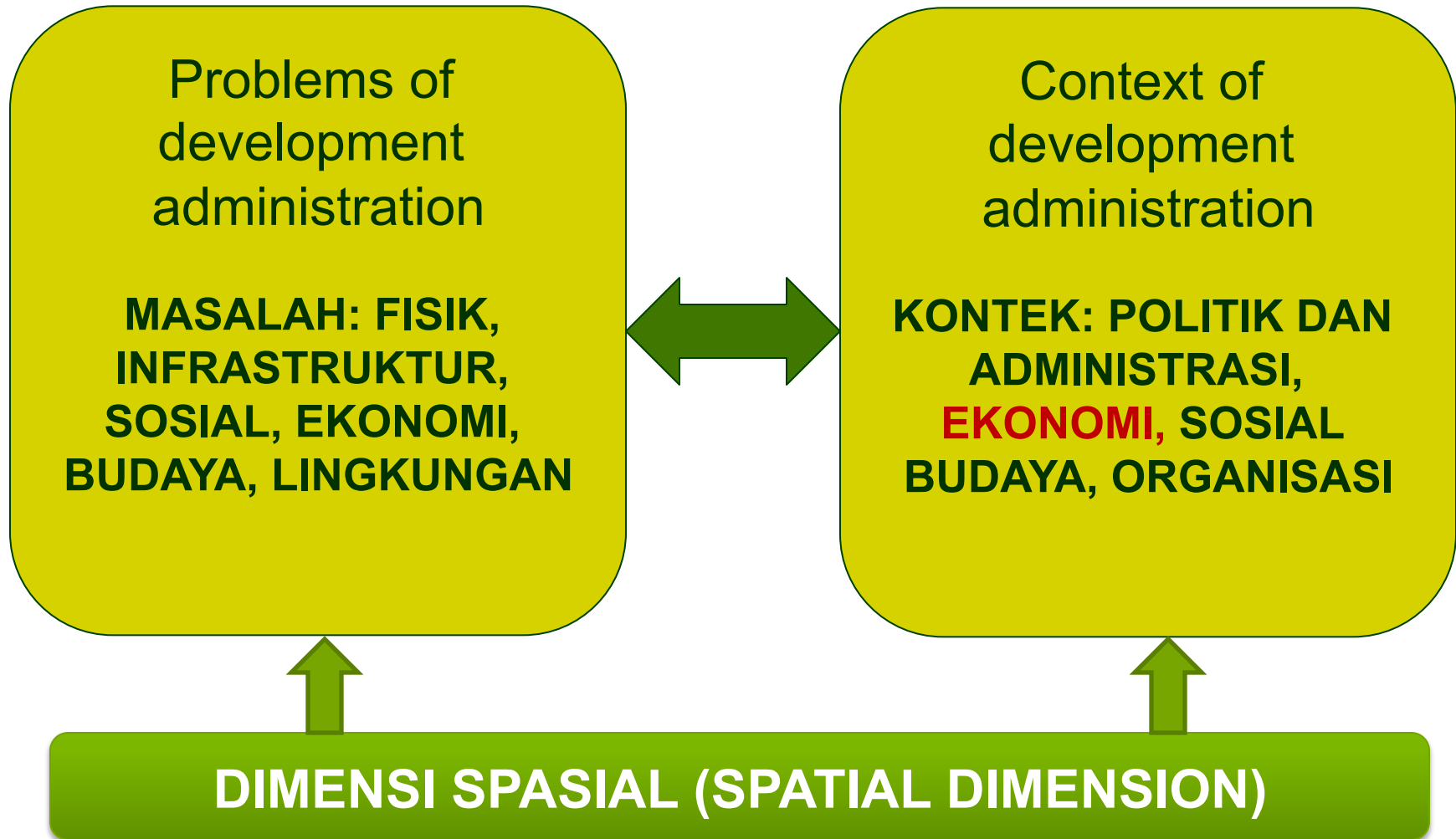
- ☐ Kemiskinan sosial
- ☐ Kemiskinan ekonomi
- ☐ Kemiskinan struktural
- ☐ Kemiskinan kultural



Pendekatan kewilayahan

- ☐ Kemiskinan di kawasan perkotaan
- ☐ Kemiskinan di kawasan pedesaan
- ☐ Kemiskinan di kawasan pedalaman dan perbatasan

KONTEK DAN MASALAH DALAM ADMINISTRASI PUBLIK DAN PEMBANGUNAN

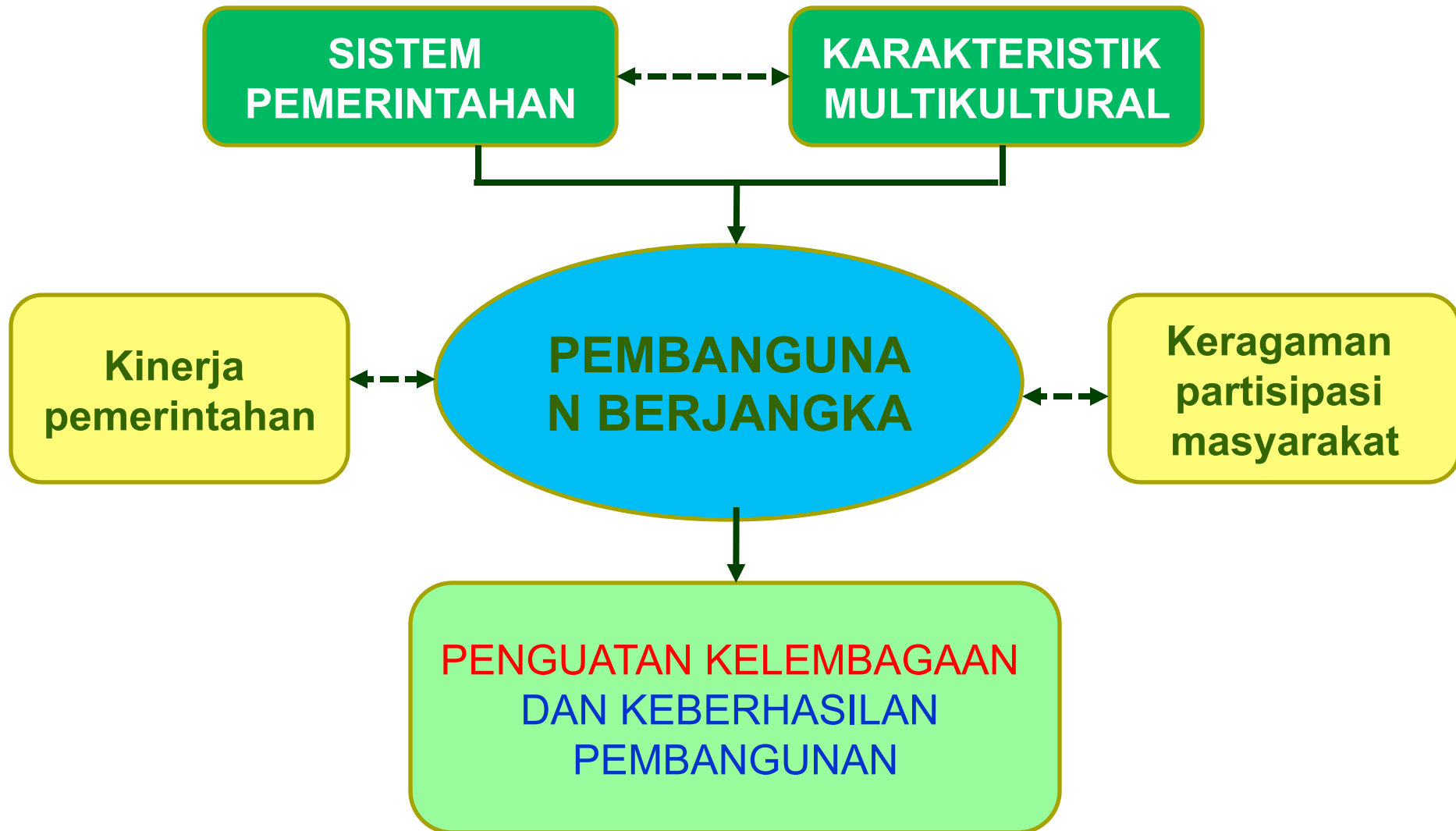


Problem kebijakan pengentasan kemiskinan

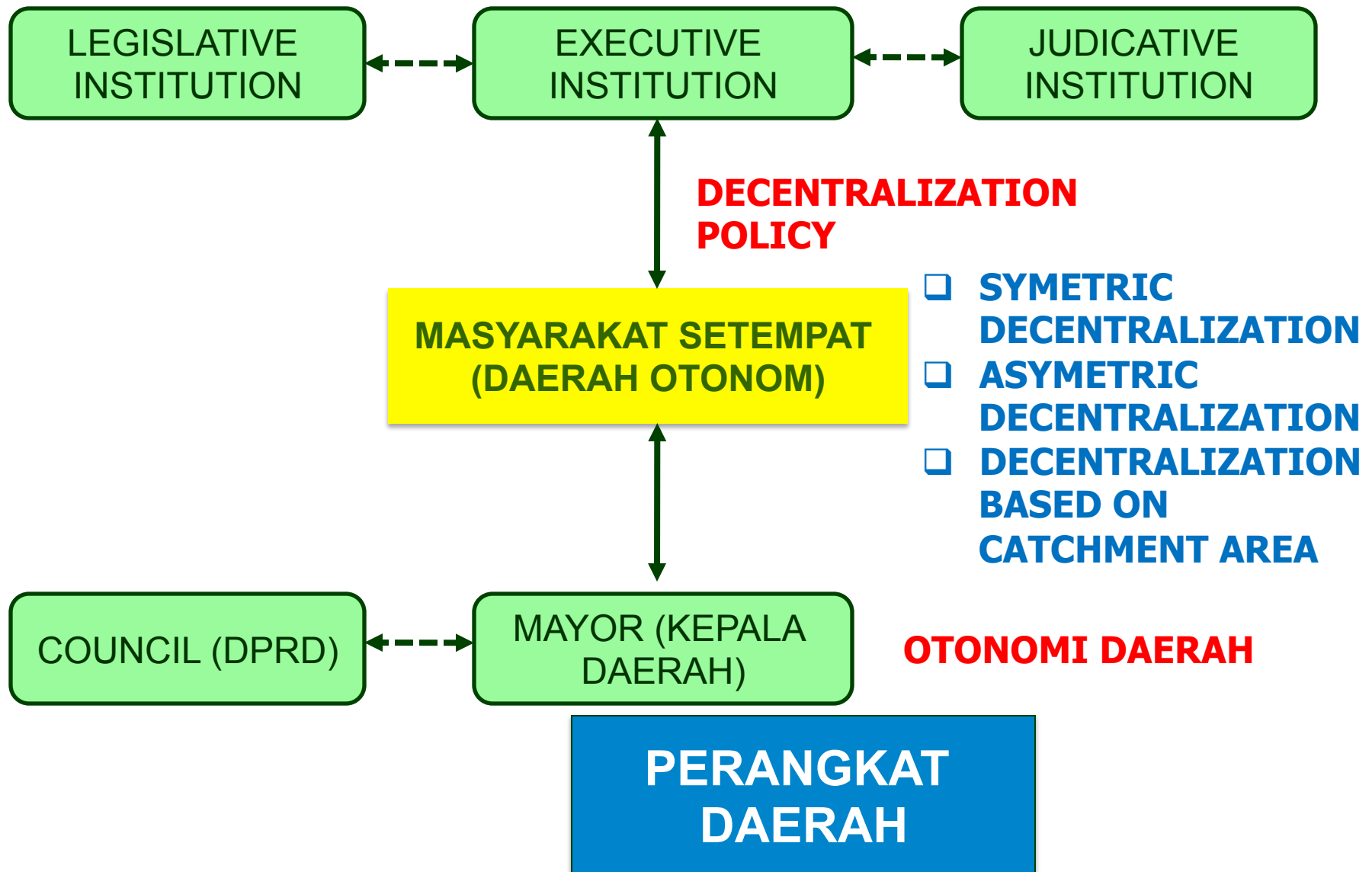
- Pembangunan bermakna *conscious and institutionalized attempt at societal development*
- Implementasi berbagai paradigma administrasi dan pembangunan belum berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan (*poverty and transient poverty*)

ALTERNATIF KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Development is a conscious and institutionalized attempt at societal development



INSTITUSI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN NKRI



KESETIMBANGAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN



- ❑ Pengarusutamaan: democratic values, managerial values, justice values
- ❑ Penyelenggaraan pemerintahan yang bermakna self government and governing community
- ❑ Keseimbangan antara unitary (persatuan/kesatuan) dan diversity (keberagaman)



Persoalan penting dalam bidang administrasi publik

- Belum adanya keseimbangan antara penggunaan pendekatan politik dan pendekatan manajerial/administratif
- Kebijakan desentralisasi belum dapat mewujudkan prinsip *local self governance*
- Inovasi pemerintahan belum berdampak signifikan terhadap penguatan kelembagaan dan peningkatan kesejahteraan

PUBLIC
ADMINISTRATION
AND PUBLIC
AFFAIR

NEW PUBLIC
ADMINISTRATION

PUBLIC
ADMINISTRATION
THEORY PRIMER

PUBLICNESS,
DEVELOPMENT
ADMINISTRATION AND
PUBLIC SERVICE

NEW PUBLIC
SERVICES

APPROACH IN
PUBLIC
ADMINISTRATION

PUBLIC POLICY
THEORY PRIMER

**THEORITICAL AND PARADIGM DIMENSION OF PUBLIC
ADMINISTRATION**

PERLUNYA INOVASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN/PEMERINTAHAN

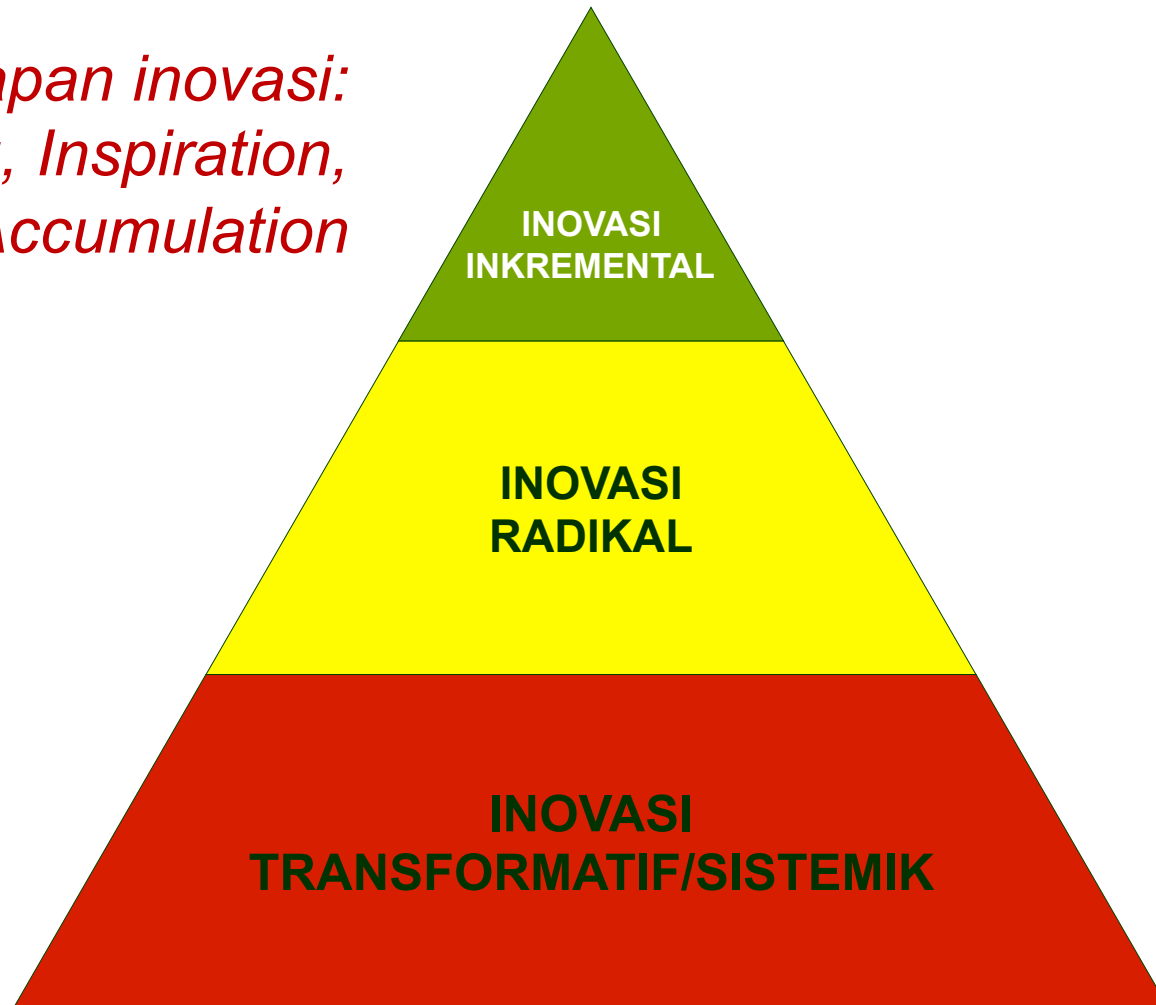
Political demand



Administrative needs

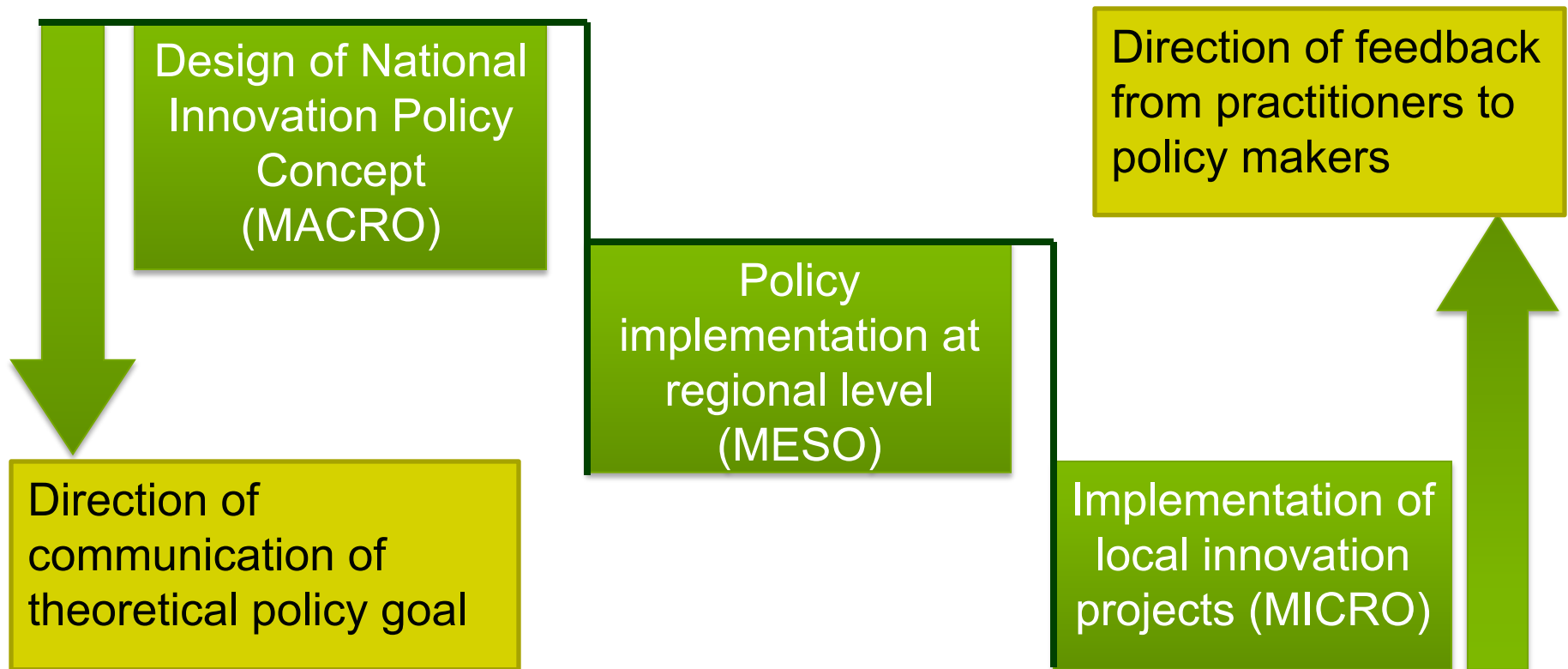
- ❑ Pergeseran Makna *Government* ke *Governance*
- ❑ Knowledge Government: *Problem-finding* Maupun *Problem-solving*
- ❑ Penggunaan konsep *Expansive Learning Theory (ELT)*, *Information Technology (IT)* dan *Socio Cultural Theory (SCT)*.
- ❑ Kualitas *local governance and democracy*: perubahan politik, perubahan manajemen pemerintahan, perubahan pengelolaan fiskal

*Tahapan inovasi:
Sharing, Inspiration,
Creation, Accumulation*



perlu evaluasi dalam setiap tahapan inovasi

Inovasi sistemik dalam penyelenggaraan pemerintahan



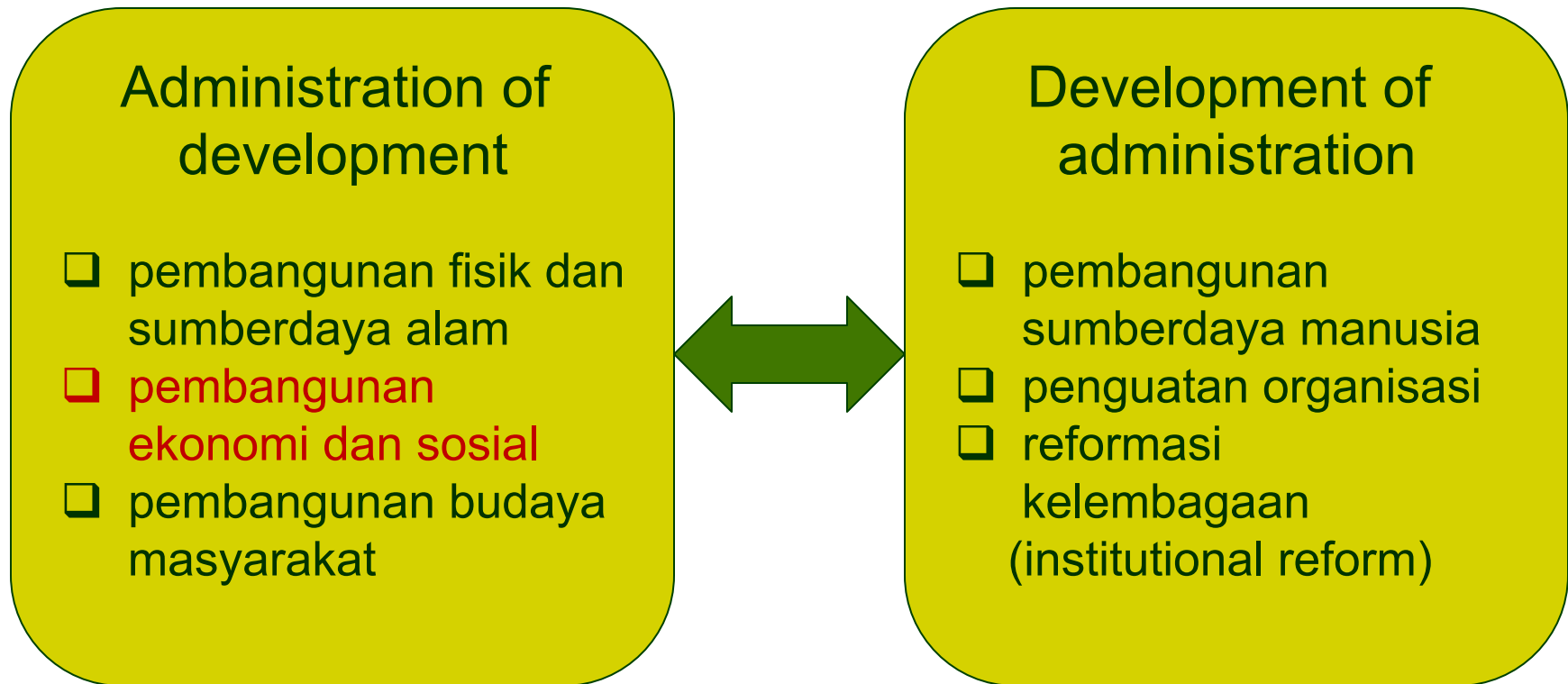
Source: Brown (2008 : 10-11)



HAMBATAN INOVASI

- tekanan dan beban administratif
- anggaran jangka pendek dan perencanaan ke depan
- kurangnya ganjaran dan insentif inovasi
- budaya menghadapi resiko
- keseganan untuk mengakhiri program yang tidak berhasil
- kendala budaya dalam pemanfaatan teknologi dan penataan kelembagaan

Inovasi dalam rangka percepatan pembangunan





Dukungan birokrasi dalam proses inovasi

- competence and skill
 - impersonal values
- representative bureaucracy

(representasi aktif dan representasi pasif)



SEKIAN TERIMA KASIH
SEMOGA BERMANFAAT